



Judul : DPR dukung pembukaan KBRI
Tanggal : Jumat, 24 April 2015
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 3

KEMERDEKAAN PALESTINA

DPR Dukung Pembukaan KBRI

JAKARTA (Suara Karya): Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan dukungannya atas rencana pemerintah membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Palestina.

"Kita dukung pernyataan presiden yang mau membuka KBRI di Palestina," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai penutupan Konferensi Parlemen Asia Afrika, di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (23/4) malam.

Menurut Fadli, apabila benar pemerintah Indonesia membuka KBRI di Palestina, dan hal itu diikuti oleh negara-negara di Asia Afrika lainnya, maka akan menjadi sebuah pengakuan defacto dan de jure bagi kemerdekaan Palestina. "Menurut delegasi Palestina, kedutaan besar RI bisa dibuka di Ramallah," kata Fadli.

Wacana mendukung kemerdekaan Palestina telah bergulir sejak masa kampanye Pemilu Presiden 2014 silam. Kala itu calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla juga berjanji membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina.

Janji semasa kampanye itu diwujudkan Presiden Jokowi dengan mengajak negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 mendukung kemerdekaan Palestina, dan didiplomasikan kembali oleh DPR dalam forum Konferensi Parlemen Asia Afrika (KPAA).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika dan telah berhasil menyusun langkah nyata untuk menindaklanjuti kerja sama konkret yang tercantum dalam deklarasi penguatan kemitraan strategis baru Asia Afrika.

"Sidang telah mengirimkan pesan kepada dunia bahwa kondisi kehidupan dunia masih tidak seimbang dan jauh dari keadilan dan jauh dari perdamaian. Oleh karena itu, Bandung Spirit masih sangat relevan dan sidang berhasil menyusun langkah nyata untuk menindaklanjuti kerja sama konkret yang tercantum dalam deklarasi penguatan kemitraan strategis baru Asia Afrika," kata Presiden Joko Widodo usai acara penutupan KTT Asia Afrika di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Kamis.

Menurut Presiden, hal tersebut sangat penting mengingat kondisi kehidupan dunia masih tidak seimbang dan jauh dari keadilan serta perdamaian.

Presiden juga mengatakan bahwa KTT Asia Afrika berhasil menyusun kerangka operasional mekanisme pemantauan yang mana para menteri luar negeri diminta untuk melakukan pertemuan setiap dua tahun sekali di sela-sela sidang umum PBB di New York.

Selain itu, kesepakatan lain

yang dihasilkan adalah pentingnya penguatan kerja sama Selatan-Selatan melalui inisiatif dan program-program pengembangan kapasitas dan kerja sama teknis.

KTT Asia-Afrika yang diselenggarakan pada 22-23 April berasal dari 106 negara terdiri atas 21 pemimpin negara, 80 wakil pemimpin negara (wakil presiden/perdana menteri), dan sisanya merupakan utusan khusus dan pejabat tingkat tinggi telah merumuskan tiga dokumen utama untuk diadopsi yaitu Bandung Message, Penguatan Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika (NAASP), dan Deklarasi Palestina.

Presiden mengatakan proses perumusan ketiga dokumen tersebut berlangsung secara terbuka dan inklusif yang mencerminkan rasa kepentingan semua pihak yang terlibat dan konsep yang dihasilkan untuk merefleksikan Dasasila Bandung dan pandangan serta kepentingan semua anggota konferensi.

"Konferensi yang telah kita jalani ini merupakan salah satu forum antar pemerintahan terbesar di dunia di luar PBB yang dihadiri oleh negara-negara Asia Afrika dan beberapa pengamat," ujar Presiden yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Yuri Thamrin. (rul)